

Laporan Kinerja

Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara

20
24



Tim Penyusun

Laporan Kinerja Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Tahun 2024

Penanggung jawab
Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si

Penyusun
Slamet Widodo, S.E., M.E.
Dian Setiono, S.Sos.
Sylvia Febrina, S.I.A., M.E., M.A.

Design
Orlando Raka, S.E., C.L.D.



Kata Pengantar

Puji Syukur Kami panjatkan kepada Allah S.W.T., karena atas perkenan-Nya Kami dapat menyelesaikan Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Tahun 2024. Pada tahun

2024, PA3KN telah berhasil meraih Peringkat 1 (satu) unit kerja terbaik atas Hasil Evaluasi Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2024 dan meraih dengan Nilai 77,20 dan kategori BB (Sangat Memuaskan). Buku laporan ini disusun sebagai komitmen serta perwujudan dari akuntabilitas kelembagaan PA3KN SETJEN DPR RI.

Hal utama yang ingin disampaikan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja ini capaian indikator kinerja PA3KN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Program Dukungan Keahlian pada Fungsi Anggaran dan Pengawasan Dewan dalam rangka memperkuat kelembagaan Badan Keahlian DPR RI sebagai organisasi pemberi dukungan keahlian. Laporan Tahunan PA3KN ini juga memuat realisasi pencapaian kinerja anggaran dan pengelolaan sumber daya organisasi selama tahun anggaran 2024.

Besar harapan kami agar kiranya laporan ini dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan menjadi masukan bagi Badan Keahlian SETJEN DPR RI dalam meningkatkan perannya pada masa mendatang.

Jakarta, 15 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

DR. AULIA SOFYAN, S.SOS., M.SI.



Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si.

Kepala Pusat Analisis Anggaran
dan Akuntabilitas Keuangan
Negara



Executive Summary

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) merupakan peleburan dari Pusat Kajian Anggaran (PKA) yang memberikan dukungan pelaksanaan fungsi anggaran dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) yang memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. PA3KN menjadi salah satu sistem pendukung Badan Keahlian yang memberikan dukungan fungsi Anggaran dan Pengawasan DPR RI sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020. Dalam memberikan dukungan fungsi anggaran, Badan Keahlian berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang melaksanakan fungsi anggaran DPR. Sementara dalam memberikan dukungan fungsi pengawasan, Badan Keahlian berkoordinasi dengan Komisi, Panitia Khusus, atau Alat Kelengkapan DPR yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Secara umum kinerja PA3KN mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Jumlah Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN yang dihasilkan sebanyak 133 Dokumen dari 50 yang ditargetkan atau berhasil mencapai 266%. Jumlah Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dihasilkan sebanyak 87 dokumen dari 50 dokumen yang ditargetkan atau berhasil mencapai 174%. Secara keseluruhan jumlah analisis/referensi/laporan yang dimanfaatkan oleh DPR RI mencapai 220 dokumen dari 100 dokumen yang ditargetkan atau berhasil mencapai indikator kinerja tersebut sebesar 220%. Pada semester I Tahun 2024 PA3KN berhasil memperoleh penghargaan atas kategori “Nilai Kinerja Organisasi Unit Kerja Eselon II Tertinggi” dari Sekretaris Jenderal DPR RI.

Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN yang ditargetkan adalah 3,30 dan PA3KN berhasil memperoleh 3.75. Selanjutnya target realisasi anggaran sebesar 99% PA3KN berhasil mencapai realisasi sebesar 99,98%. Pelaksanaan program/kegiatan dilakukan dengan *time schedule* yang terukur sehingga penyediaan bahan analisis/referensi/laporan tentang APBN untuk Dewan dapat terselesaikan tepat waktu. Keberhasilan peningkatan kinerja ini adalah komitmen yang kuat dari seluruh jajaran PA3KN. Tidak tercapainya target Nilai IKPA PA3KN Tahun 2024 adalah karena adanya Reformulasi Penilaian IKPA per bulan Mei 2024. Disamping itu,

dinamika kebijakan atas pengalokasian anggaran tahun 2024 sangat berpengaruh terhadap penilaian IKPA PA3KN dari unsur Revisi Anggaran dan Deviasi Halaman III DIPA. Hal ini menjadi tantangan ke depan bagi PA3KN untuk mengantisipasi dinamika kebijakan tersebut dan tetap melakukan perencanaan program/kegiatan yang matang di tahun selanjutnya dengan anggaran yang tersedia.

Daftar Isi

Bab	Halaman
Pendahuluan	1
Gambaran Umum	2
Dasar Hukum	3
Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	3
Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi	7
Sistematika Penyajian	8
Perencanaan dan Penetapan Kinerja	10
Uraian Ringkas tentang Rencana Strategis	11
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
Akuntabilitas Kinerja	17
Capaian Kinerja Organisasi	18
Realisasi Anggaran	36
Penutup	39
Kesimpulan	40
Upaya yang akan dilakukan Kedepan	40
Lampiran	42

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Struktur Organisasi PA3KN	5
Gambar 1.2. Komposisi SDM PA3KN Berdasarkan Jenjang Pendidikan	6
Gambar 1.3. Komposisi PNS dan PPNASN PA3KN Tahun 2024	7

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Komposisi SDM PA3KN	6
Tabel 2.1. Target Sasaran Kinerja PA3KN dalam Renstra 2020-2024	13
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja PA3KN Tahun 2024	15
Tabel 2.3. Rencana Output PA3KN Tahun 2024	16
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	18
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN dan Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L Tahun 2024	19
Tabel 3.3. Realisasi Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	19
Tabel 3.4. Realisasi Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L	20
Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN	21
Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Nilai IKPA PA3KN	21
Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Realisasi Anggaran PA3KN	24
Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024	25
Tabel 3.9. Perbandingan Komposisi SDM PA3KN tahun 2023 dan 2024	26
Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis	27
Tabel 3.11. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024	29
Tabel 3.12. Perbandingan Indeks Kepuasan Pusat-pusat di Badan Keahlian DPR RI	30
Tabel 3.13. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024	31
Tabel 3.14. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja PA3KN Tahun 2024	32
Tabel 3.15. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran PA3KN Tahun 2023 dan 2024	34
Tabel 3.16. Realisasi Anggaran PA3KN Tahun 2024	36
Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Anggaran PA3KN Tahun 2023 dan 2024	38

Pendahuluan



A. Gambaran Umum

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) merupakan peleburan dari Pusat Kajian Anggaran (PKA) yang memberikan dukungan pelaksanaan fungsi anggaran dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) yang memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. PA3KN menjadi salah satu sistem pendukung Badan Keahlian yang memberikan dukungan fungsi Anggaran dan Pengawasan DPR RI sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020. Dalam memberikan dukungan fungsi anggaran, Badan Keahlian berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang melaksanakan fungsi anggaran DPR. Sementara dalam memberikan dukungan fungsi pengawasan, Badan Keahlian berkoordinasi dengan Komisi, panitia khusus, atau alat kelengkapan DPR yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Sesuai dengan Peraturan SEKJEN Nomor 6 tahun 2024 Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang anggaran dalam penyusunan dan penetapan anggaran serta pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara. Berdasarkan Persekjen ini, maka Badan Keahlian DPR RI terdiri atas 5 (lima) pusat yaitu: 1) Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; 2) Pusat Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat; 3) Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara; 4) Pusat Analisis Keparlemenan; dan 5) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Sebagai bagian dari instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara, PA3KN berupaya melaksanakan tata kelola secara profesional berdasarkan prinsip *good governance* dan budaya kerja Ber-AKHLAK. Dalam penerapan prinsip *good governance*, transparansi dan akuntabilitas menjadi persyaratan utama yang harus dipenuhi. Untuk mewujudkannya, PA3KN sebagai unit eselon II Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI berkewajiban menyusun Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan Kinerja (LKj) PA3KN merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat dalam mencapai visi dan misi, tujuan serta sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) PA3KN, sekaligus sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang. Selain itu, laporan tersebut juga sebagai media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja PA3KN kepada masyarakat dan

para pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip Ber-AKHLAK seperti orientasi pada pelayanan, akuntabilitas, dan kolaborasi antar unit kerja juga terlihat dalam setiap aktivitas yang dilakukan, yang berkontribusi pada peningkatan kepuasan masyarakat. Laporan ini juga mencerminkan komitmen unit kerja terhadap transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme dalam menyampaikan hasil capaian serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada:

1. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah (LKJIP);
6. Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
7. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI.

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

PA3KN sesuai dengan Pasal 290 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang anggaran dalam penyusunan dan penetapan anggaran serta pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, PA3KN mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan analisis anggaran dan akuntabilitas keuangan negara;
- c. pelaksanaan dukungan evaluasi analisis anggaran dan akuntabilitas keuangan negara;
- d. pelaksanaan dukungan analisis anggaran;
- e. pelaksanaan dukungan analisis akuntabilitas keuangan negara dan kinerja Kementerian/Lembaga;
- f. pelaksanaan tata usaha Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- g. penyusunan laporan kinerja Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Sebagai salah satu unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI, PA3KN melakukan penyusunan analisis/referensi/ARC terkait APBN dan ringkasan/telaahan/analisis tentang akuntabilitas keuangan negara dan kinerja K/L. Adapun jenis output tersebut antara lain:

- a. Analisis/Referensi/ARC terkait Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2025;
- b. Analisis/Referensi/ARC terkait RUU RAPBN Tahun 2025;
- c. Analisis/Referensi/ARC terkait RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2024;
- d. Jurnal Budget APBN;
- e. Buletin APBN ;
- f. Kajian Akuntabilitas Komisi I – XI;
- g. Kajian Tematik Komisi;
- h. Accountability Paper;
- i. Accountability Brief;
- j. Ringkasan IHPS II Tahun 2023;
- k. Ringkasan IHPS I Tahun 2024;
- l. Ringkasan LKPP Tahun 2023;
- m. Buku terkait APBN.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, PA3KN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI dan dipimpin oleh Kepala Pusat serta dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yaitu analis APBN serta kelompok struktural yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi PA3KN. Adapun pengorganisasian di PA3KN sebagaimana bagan berikut ini:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi PA3KN



Sumber: Portal DPR, diolah kembali

3. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PA3KN didukung SDM sebanyak 42 (empat puluh dua) orang pegawai, yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Pejabat Eselon II (Kepala PA3KN);
- 1 (satu) orang Eselon IV (Kepala Sub Bagian Tata Usaha);
- 33 (tiga puluh tiga) orang fungsional Analis APBN yang meliputi 9 (sembilan) orang fungsional Analis APBN Ahli Madya, 10 (sepuluh) orang fungsional Analis APBN Ahli Muda dan 14 (empat belas) orang fungsional Analis APBN Ahli Pertama;
- 7 (tujuh) orang Staf Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha.

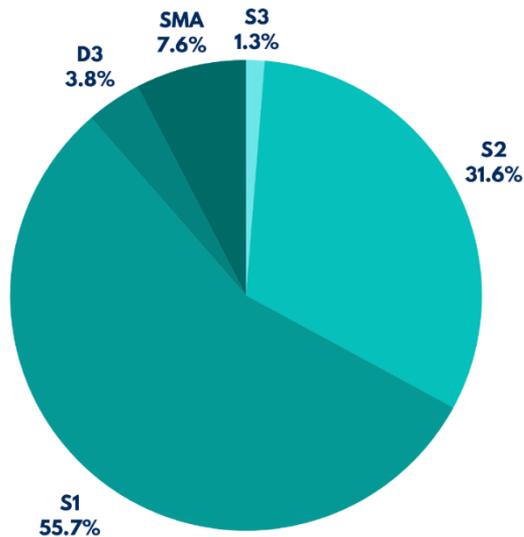
Tabel 1.1. Komposisi SDM PA3KN

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Kepala PA3KN	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3.	Analisis APBN Ahli Madya	9
4.	Analisis APBN Ahli Muda	10
5.	Analisis APBN Ahli Pertama	14
6.	Staf Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha	7
Jumlah		42

Sumber: Portal DPR, diolah kembali

Berdasarkan jenjang pendidikan, SDM PA3KN terdiri dari Strata 3 sebanyak 1 (satu) orang, Strata 2 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Strata 1 sebanyak 44 (empat puluh empat) orang, Diploma 3 sebanyak 1 (satu) orang dan SLTA sebanyak 6 (enam) orang.

Gambar 1.2. Komposisi SDM PA3KN Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber: Portal DPR, diolah kembali

Sementara itu, komposisi SDM yang berstatus ASN adalah

sebanyak 39 orang atau 93% (Jabatan Struktural dan Fungsional) dan SDM yang berstatus PPNASN sebanyak 3 orang atau 7% (Staf Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha)

Gambar 1.3. Komposisi PNS dan PPNASN PA3KN Tahun 2024



Sumber: Portal DPR, diolah kembali

4. Anggaran

Anggaran PA3KN tahun 2024 bersumber dari APBN TA 2024. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, berdasarkan RAB TA 2024 PA3KN memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp5.729.642.000,-**. Anggaran PA3KN berdasarkan DIPA TA 2024 adalah sebesar Rp6.765.474.000,-. Dalam rangka mendukung kenaikan tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2024, maka kebijakan Optimalisasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2024 mengubah alokasi anggaran PA3KN TA 2024 menjadi sebesar Rp5.314.442.000,-. Pada triwulan IV tahun 2024, PA3KN merelokasi anggaran sebesar Rp84.800.000,- ke Biro SDMA untuk pembayaran Kontrak Kerja Tenaga Pramubakti. Untuk mendukung pelaksanaan kinerja PA3KN, mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp500.000.000,- sehingga alokasi anggaran PA3KN TA 2024 sebesar Rp5.729.642.000,-.

D. Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Ekspektasi yang tinggi dari masyarakat kepada DPR RI dalam proses penyusunan APBN yang efektif dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, merupakan tantangan bagi PA3KN untuk dapat memberikan kajian/analisis yang berkualitas kepada DPR RI dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan APBN. Kajian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan.

Sebagai unsur *supporting system* Dewan di bidang keahlian terutama terkait dengan fungsi anggaran dan pengawasan, PA3KN mempunyai tugas pokok membuat kajian/analisis yang akan disampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Selain itu,

kajian/analisis PA3KN juga disampaikan kepada perguruan tinggi, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan eksternal terkait lainnya. Untuk itu, penataan personil, tata kerja internal maupun eksternal, komunikasi dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan perlu dikembangkan lebih optimal lagi.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja PA3KN Tahun 2024 di susun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan hal-hal umum tentang organisasi, uraian singkat tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan komposisi pegawai dan sumber daya dan anggaran yang tersedia serta penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana kinerja Tahun 2024, serta perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2024. Pada bab ini juga disampaikan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran TA 2024. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Pada pembahasan Realisasi Anggaran, diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB IV

PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja PA3KN serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan PA3KN mengatasi permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja PA3KN serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja, Hasil Reviu

Perencanaan dan Penetapan Kinerja



A. Uraian Ringkas tentang Rencana Strategis

1. Visi

Visi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah “Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Untuk mendukung visi Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Badan Keahlian sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI merumuskan visi yang selaras dengan visi Sekretariat Jenderal DPR RI dan merupakan gambaran keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan di tahun 2024, yaitu sebagai berikut: “Menjadi Badan Keahlian DPR RI yang Profesional, Andal, dan Akuntabel”.

Visi tersebut mencerminkan cita-cita dan harapan untuk menjadi unit kerja yang berkinerja tinggi melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) sebagai bagian dari Badan Keahlian yang profesional mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas sumber daya manusia. PA3KN sebagai bagian dari Badan Keahlian yang andal mempunyai makna bahwa mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan. PA3KN sebagai bagian dari Badan Keahlian yang akuntabel mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR RI dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI.

Untuk mencapai visi di atas, PA3KN senantiasa menginternalisasikan 10 (sepuluh) Nilai Kerja Badan Keahlian, yaitu: *User oriented services; Neutral and impartial; Research based output; Professional and ethics based; Academic cultured*

minded; IT knowledge management based; Sharing data minded; Networking minded; Entrepreneurship minded; Innovative, creative, proactive, efficient, result and impact oriented working; Implement Pancasila and be the guardian of national interest and Pancasila. Dari kesepuluh nilai tersebut dapat diterjemahkan bahwa: pertama, dukungan dan layanan keahlian DPR RI harus berorientasi pada kebutuhan Anggota DPR RI, netral dan tidak memihak, didasarkan pada penelitian/riset, serta sejalan dengan Pancasila dan kepentingan nasional; kedua, sumber daya manusia PA3KN dalam memberikan layanan dan dukungan keahlian harus mengedepankan profesionalisme, etika profesi, budaya akademis, pemanfaatan teknologi dan informasi, budaya saling bertukar data dan informasi, pengembangan jejaring dalam dan luar negeri, serta jiwa kewirausahaan yang inovatif, kreatif, proaktif, efisien, dan berorientasi pada hasil dan dampak.

2. Misi

Sebagai salah satu unsur di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI yang berperan dalam memberikan dukungan keahlian, PA3KN senantiasa menjalankan misi Badan Keahlian yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.
- b. Menyelenggarakan tata kelola Badan Keahlian yang akuntabel dan transparan.

3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 009 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Setjen DPR RI menetapkan 3 (tiga) tujuan yang dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:

- a. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi DPR RI;
- b. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang professional, baik, dan bersih; dan
- c. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap.

Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat

dicapai dalam kurun waktu tertentu dimana Setjen DPR RI memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

- a. Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI;
- b. Terwujudnya tata kelola pemerintah di Setjen DPR RI yang berkualitas; dan
- c. Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintah berbasis elektronik.

Sasaran program adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata dari suatu program. Sasaran program yang akan dicapai oleh PA3KN selaras dengan sasaran yang akan dituju oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu agar terpenuhi kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Badan Keahlian maka dirumuskan Sasaran Program PA3KN adalah peningkatan dukungan analisis di bidang anggaran dalam penyusunan dan penetapan anggaran serta pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara kepada DPR RI, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan, rencana program, dan anggaran;
- b. Melaksanakan dukungan analisis anggaran dan akuntabilitas keuangan negara.

Tabel 2.1. Target Sasaran Kinerja PA3KN dalam Renstra 2020-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Analisis dalam Penyusunan dan Penetapan Anggaran serta Pelaksanaan dan Pengawasan Keuangan Negara terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPR RI	1. Persentase Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%	100%	100%	100%
	3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN	3,07	3,07	3,29	3,30
	4. Nilai IKPA PA3KN: - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	-	-	-	96 9,60 19,20 24,00 14,40 28,80
	5. Persentase Realisasi Anggaran	-	-	-	99%

Sumber: Renstra Badan Keahlian DPR RI, diolah kembali

Target untuk Indikator Kinerja 1. Persentase Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR dan 2. Persentase Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang

Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI ditentukan sama dari tahun 2021 s.d 2024, yaitu sebesar 100%. Indikator Kinerja Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN ditargetkan naik pada tahun 2023 dan 2024 yaitu sebesar 3,24 dan 3,26. Target Indikator Kinerja Nilai IKPA dan Realisasi Anggaran baru ditetapkan untuk tahun 2024. Indikator Kinerja Nilai IKPA yaitu sebesar 96 dengan penjabaran Nilai Revisi DIPA 9,60; Nilai Deviasi Halaman III DIPA 19,20; Penyerapan Anggaran 24,00; Penyelesaian Tagihan 14,40; dan Capaian Output 28,80. Target Realisasi Anggaran Tahun 2024 ditetapkan sebesar 99%.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja Tahunan berisi sasaran program, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran program dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode.

PA3KN terbentuk pada bulan Juli Tahun 2023 dimana merupakan hasil peleburan 2 unit eselon II yaitu Pusat Kajian Anggaran dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Dengan demikian, tahun 2024 merupakan tahun pertama PA3KN melakukan penyesuaian penggabungan terkait dengan target kinerja organisasi dimana mencakup rencana kerja dan anggaran organisasi.

Sasaran program PA3KN adalah meningkatnya kualitas analisis dalam penyusunan dan penetapan anggaran serta pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI. Adapun target dari masing-masing indikator tersebut adalah:

1. Persentase Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI;
2. Persentase Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI;
3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN;
4. Nilai IKPA PA3KN;
5. Realisasi Anggaran PA3KN.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja PA3KN Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas analisis dalam penyusunan dan penetapan anggaran serta pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI	1. Persentase Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI	dokumen	100% (50 dokumen)
		2. Persentase Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI	dokumen	100% (50 dokumen)
		3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN	indeks	3,30
		4. Nilai IKPA PA3KN: - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	nilai	96 9,60 19,20 24,00 14,40 28,80
		5. Realisasi Anggaran PA3KN	persen	99%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja PA3KN Tahun 2024

Perjanjian Kinerja antara Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kepala Badan keahlian DPR RI telah ditetapkan yaitu Persentase Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN dan Persentase Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L adalah 100%. Target atas Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN meningkat menjadi 3,30 dari sebelumnya yaitu 3,29. Target Nilai IKPA PA3KN Tahun 2024 adalah sebesar 96 dan target Realisasi Anggaran PA3KN adalah sebesar 99%.

Perjanjian Kinerja PA3KN telah sesuai dengan *cascading* antara Rencana Strategis Setjen DPR RI yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis Badan Keahlian DPR RI Tahun 2020-2024 Revisi ke-2.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana

kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi PA3KN untuk mencapainya dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan sasaran program di atas, kemudian dijabarkan lebih luas dalam Rencana Kerja (Renja) PA3KN maka disusunlah Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. PA3KN telah menetapkan target sebagaimana dalam dokumen Renja Tahun 2024 sebanyak 50 dokumen Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN dan 50 dokumen Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L sebagaimana dirinci pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Rencana Output PA3KN Tahun 2024

No	Output	Jumlah
Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN		
1	Analisis	11
2	Analisis Ringkas Cepat	11
3	Buku	2
4	Buletin	24
5	Jurnal	2
Total		50
Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L		
1	Accountability Paper	5
2	Accountability Brief	22
3	Ringkasan IHPS I	11
4	Ringkasan IHPS II	11
5	LKPP	1
Total		50
Total Keseluruhan		100

Sumber: Dokumen Renja PA3KN Tahun 2024

Akuntabilitas Kinerja



A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil dan manfaat (*outcome*) serta dampak (*impact*). Pengukuran kinerja kegiatan mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input dan output; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (*target*); mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; dan menghitung rencana dan realisasi berdasarkan persentasenya.

Analisis pencapaian kinerja sebagai parameter untuk mengukur tingkat keberhasilan program telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan dengan mengolah data dari Perencanaan dan Penetapan Kinerja serta Rencana Kegiatan Tahunan. Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam penyusunan laporan kinerja ini adalah dokumen penetapan kinerja PA3KN tahun 2024 yang menetapkan output yang masuk dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas analisis dalam penyusunan dan penetapan anggaran serta pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI	1. Persentase Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100% (50 dokumen)	(133 dokumen)	266%
		2. Persentase Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100% (50 dokumen)	(87 dokumen)	174%
		3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN	3,30	3,75	113%
		4. Nilai IKPA PA3KN: - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	96 9,60 19,20 24,00 14,40 28,80	79,38 10 4,78 20,00 10,00 16,67	82,68%
		5. Realisasi Anggaran PA3KN	99%	99,98%	100,98%

Sumber: Dokumen Capaian Kinerja PA3KN Tahun 2024

Secara umum PA3KN telah mencapai Capaian Kinerja yang baik terlihat dari jumlah output dan Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan PA3KN. Selanjutnya penjelasan atas perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja PA3KN dijabarkan dibawah ini.

1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN dan Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100% (50 dokumen)	(133 dokumen)	266%
Persentase Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100% (50 dokumen)	(87 dokumen)	174%

Sumber: Dokumen Capaian Kinerja PA3KN Tahun 2024

Pada Tahun 2024 PA3KN telah menetapkan target sebagaimana dalam dokumen RKT adalah 100 dokumen yaitu 50 dokumen Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN serta 50 dokumen Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L. Dari target 50 dokumen Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN, direalisasikan sebanyak 133 dokumen atau persentase realisasinya mencapai 266%. Untuk target 50 dokumen Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L, direalisasikan sebanyak 87 dokumen atau persentase realisasinya mencapai 174%. Berikut adalah rincian realisasi output PA3KN di tahun 2024:

Tabel 3.3. Realisasi Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN

No	Jenis Output	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Realisasi	Target
1	Analisis	1	42	35	6	84	11
2	ARC	4	2	3	10	19	11
3	Buku	-	1	1	2	4	2
4	Buletin	6	6	6	6	24	24
5	Jurnal	-	1	-	1	2	2
	Jumlah	11	52	45	25	133	50

Sumber: Data Capaian Output PA3KN Tahun 2024

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel tersebut, jumlah realisasi output Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN adalah sebanyak 133 dokumen dengan rincian 84 (delapan puluh empat) Analisis, 19 (sembilan belas) ARC, 4 (empat) Buku, 24 (dua puluh empat) Buletin, dan 2 (dua) Jurnal. Banyaknya jumlah realisasi Analisis dan ARC adalah karena banyaknya permintaan Anggota dan/atau AKD sebagai bahan rapat kerja AKD. Dengan demikian capaian realisasi output Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN adalah 266%.

Tabel 3.4. Realisasi Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L

No	Jenis Output	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Realisasi	Target
1	Accountability Brief	11	-	11	-	22	22
2	Accountability Paper	-	3	-	3	6	5
3	Ringkasan LKPP	-	-	12	-	12	1
4	Ringkasan IHPS I Tahun 2024	-	-	-	13	13	11
5	Ringkasan IHPS II Tahun 2023	-	11	-	-	11	11
6	Ringkasan Dapil	-	-	-	4	4	-
7	Ringkasan PMN	-	-	16	-	16	-
8	Kajian	-	-	-	3	3	-
	Jumlah	11	14	23	16	87	50

Sumber: Data Capaian Output PA3KN Tahun 2024

Jumlah realisasi output Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L adalah sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) dokumen dengan rincian 22 (dua puluh dua) Accountability Brief, 6 (enam) Accountability Paper, 1 (satu) Ringkasan LKPP, 13 (tiga belas) Ringkasan IHPS I Tahun 2024, 11 (sebelas) Ringkasan IHPS II Tahun 2023, 4 (empat) Ringkasan Dapil, 16 (enam belas) Ringkasan PMN, 3 (tiga) Kajian. Banyaknya jumlah output di luar RKT adalah karena banyaknya permintaan dari Anggota dan/atau AKD sebagai bahan rapat kerja AKD termasuk dengan output Ringkasan Dapil, Ringkasan PMN, dan Kajian di luar dari output yang direncanakan dalam RKT. Dengan demikian capaian realisasi output Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L adalah 174%.

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN	3,30	3,75	113%

Sumber: Laporan SKM terhadap Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024

Perjanjian Kinerja PA3KN dengan Kepala Badan Keahlian menargetkan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN yaitu sebesar 3,30. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024. Berdasarkan Laporan SKM tersebut, telah dilakukan survei atas layanan PA3KN terhadap Anggota dan AKD dengan jumlah responden sebanyak 204 (dua ratus empat) responden Anggota DPR RI dan 40 (empat puluh) responden Non Anggota DPR RI. Lingkup Layanan dalam Kuesioner tersebut adalah: 1.) Layanan Analisis: Analisis Ringkas Cepat; Buletin APBN; Budget Issue Brief; Sekilas APBN; Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK; Accountability Brief; Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI; dan Jurnal Budget; 2.) Visualisasi Data APBN dan Akuntabilitas; dan 3.) Layanan Publikasi Online Buku-Buku Tematik. Hasil Laporan SKM tersebut disebutkan bahwa telah diperoleh Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN yaitu sebesar 3,75 dengan Kategori Mutu Layanan A dan Kinerja Pelayanan Sangat Baik. Dengan demikian diperoleh capaian atas Indikator Kinerja tersebut adalah sebesar 113%.

Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Nilai IKPA PA3KN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai IKPA PA3KN:	96	79,38	82,68%
- Revisi DIPA	9,60	10,00	
- Deviasi Halaman III DIPA	19,20	4,78	
- Penyerapan Anggaran	24,00	20,00	
- Penyelesaian Tagihan	14,40	10,00	
- Capaian Output	28,80	16,67	
- Belanja Kontraktual	-	10,00	

Sumber: Digital DPR RI

Tahun 2024 adalah tahun pertama dimana Nilai IKPA diperjanjikan sebagai Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja seluruh Unit Kerja di lingkungan Setjen DPR RI. Target untuk Indikator Kinerja Nilai IKPA PA3KN Tahun 2024 adalah sebesar 96 dengan rincian nilai: Revisi DIPA 9,60; Deviasi Halaman III DIPA 19,20; Penyerapan Anggaran 24,00; Penyelesaian Tagihan 14,40; dan Capaian Output 28,80. Target tersebut ditentukan berdasarkan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rapor IKPA, dimana bobot penilaian IKPA terdiri dari Revisi DIPA 10%, Deviasi Halaman III DIPA 15%, Penyerapan Anggaran 10%, Belanja Kontraktual 10%, Penyelesaian Tagihan 15% dan Capaian Output 30%.

Realisasi hasil penilaian IKPA PA3KN adalah berdasarkan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rapor IKPA dengan bobot penilaian terdiri dari Revisi DIPA 10%, Deviasi Halaman III DIPA 10%, Penyerapan Anggaran 25%, Belanja Kontraktual 10%, Penyelesaian Tagihan 10%, Capaian Output 25% dan Pengelolaan Uang Muka dan KKP 10%. Dengan demikian terdapat perbedaan antara target per indikator penilaian IKPA dengan realisasi per-indikator penilaian IKPA. Hasil penilaian Realisasi Nilai IKPA PA3KN Tahun 2024 adalah sebesar 79,38 dengan rincian: Revisi DIPA 10,00; Deviasi Halaman III DIPA 4,78; Penyerapan Anggaran 20,00; Penyelesaian Tagihan 10,00; dan Capaian Output 16,67. Dengan demikian diperoleh capaian atas Indikator Kinerja Nilai IKPA adalah sebesar 82,68%.

Tidak tercapainya target Nilai IKPA PA3KN Tahun 2024 disebabkan beberapa hal yaitu :

1. Adanya Reformulasi Penilaian IKPA.

Pada bulan Mei tahun 2024, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menetapkan Peraturan Nomor PER-5/PB/2024 yang memperbarui Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk Kementerian/Lembaga. Perubahan utama dalam reformulasi IKPA 2024, dengan demikian Sekretaris Jenderal merubah Peraturan terkait Rapor IKPA melalui Instruksi Sekjen DPR RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rapor IKPA, perubahan tersebut meliputi:

- a. Perubahan Formulasi Penilaian pada Enam Indikator: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan

- Tambahan Uang Persediaan (TUP), Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM);
- b. Perubahan Bobot Indikator Deviasi Halaman III DIPA: bahwa bobot indikator ini meningkat dari 10% menjadi 15%;
 - c. Penggunaan Rata-Rata Tertimbang: Formula penilaian untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran kini menggunakan rata-rata tertimbang dengan mempertimbangkan proporsi pagu pada masing-masing jenis belanja;
 - d. Penambahan Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak: Pada indikator Belanja Kontraktual, ditambahkan komponen yang menilai rasio jumlah kontrak yang diterbitkan hingga Triwulan II dibandingkan dengan total kontrak hingga akhir tahun
 - e. Penilaian Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP): Pada indikator Pengelolaan UP dan TUP, ditambahkan penilaian penggunaan KKP dengan target triwulan 1 : 1% dari besaran UP KKP per bulan yang disetahunkan; Triwulan II: 5%; Triwulan III: 9%; Triwulan IV: 12,5%.

2. Revisi DIPA akibat adanya dinamika kebijakan.

Dinamika kebijakan atas pengalokasian anggaran di tahun 2024 juga sangat berpengaruh terhadap penilaian IKPA PA3KN tahun 2024, terutama pada indikator Deviasi Halaman III DIPA. Dinamika kebijakan tersebut membuat PA3KN harus melakukan beberapa kali revisi atas RAB PA3KN Tahun 2024 serta perubahan dari Rencana Penarikan Dana (RPD) triwulan yang telah disusun. Revisi yang dilakukan diantaranya:

- a. Revisi pada triwulan I tahun 2024, dalam rangka mendukung kenaikan tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2024. PA3KN merelokasi anggaran sebesar Rp1.251.032.000,- ke Biro Keuangan untuk mendukung kebijakan Optimalisasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2024.
- b. Revisi pada triwulan I tahun 2024, untuk merelokasi anggaran PA3KN ke Biro Umum sebesar Rp200.000.000,- atas anggaran Belanja Sewa Perlengkapan Kantor.
- c. Revisi pada triwulan IV tahun 2024, dalam rangka pembayaran Kontrak Kerja Tenaga Pramubakti yang beralih statusnya menjadi PPNASN Tenaga Sistem Pendukung (TSP), PA3KN harus merelokasi anggaran sebesar Rp84.800.000,- ke Biro SDMA.

- d. Revisi pada triwulan IV tahun 2024, karena adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp500.000.000,- untuk mendukung pelaksanaan kinerja PA3KN.

Atas dinamika kebijakan tersebut, PA3KN harus melakukan pengajuan revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) beberapa kali dalam satu tahun serta ketidaksesuaian penarikan dana dari RPD triwulan yang ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan sangat rendahnya indikator nilai Deviasi Halaman III DIPA sehingga berakibat pada tidak tercapainya akumulasi Nilai IKPA PA3KN tahun 2024. Hal ini menjadi tantangan bagi PA3KN di tahun berikutnya untuk dapat melakukan penyesuaian atas dinamika kebijakan pengalokasian anggaran serta perencanaan yang matang atas program kerja.

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Realisasi Anggaran PA3KN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Realisasi Anggaran PA3KN	99%	99,98%	100,98%

Sumber: SAKTI Kemenkeu, diolah kembali

Target untuk Indikator Kinerja Realisasi Anggaran PA3KN Tahun 2024 adalah 99%. Dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya, alokasi anggaran yang diterima PA3KN pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp5.729.642.000,-**. Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2024, PA3KN mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp6.765.474.000,-. Dalam rangka mendukung kenaikan tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2024, maka kebijakan Optimalisasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2024 mengubah alokasi anggaran PA3KN TA 2024 menjadi sebesar Rp5.314.442.000,-. Pada triwulan IV tahun 2024, PA3KN merelokasi anggaran sebesar Rp84.800.000,- ke Biro SDMA untuk pembayaran Kontrak Kerja Tenaga Pramubakti serta mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp500.000.000,-. Dengan demikian alokasi anggaran PA3KN TA 2024 sebesar Rp5.729.642.000,-. Di akhir tahun 2024, PA3KN tetap dapat merealisasikan anggaran tersebut dengan persentase sebesar 99,98%. Dengan demikian diperoleh capaian atas Indikator Kinerja Realisasi Anggaran adalah sebesar 100,98%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

PA3KN terbentuk pada bulan Juli Tahun 2023 hasil peleburan 2 (dua) Pusat yaitu PKA dan PKAKAN. Tahun 2024 adalah pertama kalinya PA3KN memiliki Perjanjian Kinerja baru. Dengan demikian data yang akan ditampilkan di tahun 2022 dan 2023 adalah data gabungan dari unit kerja PKA dan PKAKN.

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas analisis dalam penyusunan dan penetapan anggaran serta pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI	Persentase Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100% (50 dokumen)	(74 dokumen)	148%	100% (50 dokumen)	(164 dokumen)	328%	100% (50 dokumen)	(133 dokumen)	266%
	Persentase Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100% (50 dokumen)	(137 dokumen)	274%	100% (50 dokumen)	(137 dokumen)	274%	100% (50 dokumen)	(87 dokumen)	174%
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN	3,07	3,29	107%	3,29	3,77	114%	3,3	3,75	113%
	Nilai IKPA PA3KN	-	N/A	-	-	N/A	-	96	79,38	82,68%
	Realisasi Anggaran PA3KN	96%	99,96%	104%	99%	99,99%	101%	99%	99,98%	100,98%

Sumber: Dokumen Capaian Kinerja PA3KN Tahun 2024

Data yang ditampilkan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023, capaian output Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN meningkat pesat yang sebelumnya adalah 148% menjadi 328% dan menurun di tahun 2024 menjadi 266%. Demikian juga capaian output Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 274% dan menurun di tahun 2024 yaitu sebesar 174%. Jika melihat Laporan Kinerja PA3KN Tahun 2023 dijelaskan bahwa di tahun 2023 PA3KN memiliki SDM Analisis APBN Non Fungsional yang berstatus PPNASN sebagai Tenaga Sistem Pendukung sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang. Berikut ditampilkan perbandingan jumlah SDM PA3KN pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel 3.9. Perbandingan Komposisi SDM PA3KN tahun 2023 dan 2024

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	
		2023	2024
1.	Kepala PA3KN	1	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1
3.	Analisis APBN Ahli Madya	4	9
4.	Analisis APBN Ahli Muda	9	10
5.	Analisis APBN Ahli Pertama	20	14
6.	Staf Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha	4	7
7.	Analisis Non Fungsional (PPNASN)	34	0
8.	Pramubakti	4	0
Jumlah		77	42

Sumber: Portal DPR RI

Adanya kebijakan bahwa TSP tidak dapat ditempatkan pada jabatan fungsional mengakibatkan PA3KN harus kehilangan 34 (tiga puluh empat) orang Analisis Non Fungsional (PPNASN) yang membantu dalam penyusunan output PA3KN di tahun 2024. Namun demikian PA3KN telah mencapai realisasi kinerja yang cukup tinggi di tahun 2024 dengan jumlah SDM yang tersedia.

Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN juga meningkat pesat dari tahun 2022 ke tahun 2023. Peningkatan tersebut selaras dengan tingginya peningkatan hasil capaian output Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN dan Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L di tahun 2023. Pada tahun 2024 Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN sedikit menurun yaitu dari 3,77 ke angka 3,75 selaras dengan menurunnya jumlah capaian output PA3KN di tahun 2024. Namun demikian, capaian Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN menunjukkan angka yang tinggi meskipun jumlah capaian output menurun.

Tahun 2024 adalah tahun pertama Nilai IKPA menjadi salah satu Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja PA3KN. Tidak tersedia data target serta capaian Nilai IKPA pada tahun 2022 dan 2023. Nilai IKPA PA3KN Tahun 2024 adalah sebesar 79,38 dengan rincian nilai: Revisi DIPA 10,00; Deviasi Halaman III DIPA 4,78;

Penyerapan Anggaran 20,00; Penyelesaian Tagihan 10,00; dan Capaian Output 16,67. Dengan demikian diperoleh capaian atas Indikator Kinerja Nilai IKPA adalah sebesar 82,68%. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Indikator Kinerja Nilai IKPA PA3KN tahun 2024 tidak tercapai karena adanya Reformulasi penilaian IKPA serta dinamika kebijakan yang menyebabkan tidak sesuai realisasi penarikan dana dengan Rencana Penarikan Dana (RPD). Hal tersebut berdampak pada akumulasi Nilai IKPA dan tidak tercapainya target Nilai IKPA PA3KN Tahun 2024.

Data Realisasi Anggaran PA3KN tahun 2022 juga merupakan gabungan dari unit kerja PKA dan PKAKN karena PA3KN baru terbentuk pada bulan Juli 2024 dan merupakan gabungan dari kedua unit kerja tersebut. Data 2022, 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa PA3KN selalu berhasil merealisasikan anggaran diatas 99%. Hal tersebut menunjukkan bahwa PA3KN mampu memanfaatkan hampir seluruh anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan atau program yang direncanakan. Hal ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan yang baik serta dapat menghindari tingginya nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Perbandingan antara realisasi kinerja PA3KN tahun 2024 dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Badan Keahlian Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir pada Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas analisis dalam penyusunan dan penetapan anggaran serta pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara terkait dengan pelaksanaan fungsi	Persentase Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI	(133 dokumen)	100% (50 dokumen)	266%
2		Persentase Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI	(87 dokumen)	100% (50 dokumen)	174%

3	anggaran dan pengawasan DPR RI	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN	3,75	3,30	113%
4		Nilai IKPA PA3KN	79,38	96	82,68%
5		Realisasi Anggaran PA3KN	99,98%	99%	100,98%

Sumber: Renstra Badan Keahlian DPR RI Tahun 2020-2024

Secara garis besar PA3KN telah mencapai target akhir tahun 2024 berdasarkan Renstra Badan Keahlian DPR RI, kecuali pada indikator Nilai IKPA PA3KN. Tingkat kemajuan pada tahun 2024 atas Indikator Kinerja Persentase Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI adalah sebesar 266%. Tingkat kemajuan pada Indikator Kinerja Persentase Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI adalah sebesar 174%.

Tingkat kemajuan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN tahun 2024 yaitu sebesar 113%. Sedangkan tingkat kemajuan untuk Indikator Kinerja Realisasi Anggaran PA3KN Tahun 2024 adalah 100,98%. Keberhasilan tingkat kemajuan realisasi kinerja PA3KN tahun 2024 adalah komitmen yang kuat dari seluruh jajaran PA3KN. Pada indikator kinerja Nilai IKPA PA3KN, tingkat kemajuannya adalah sebesar 82,68%. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa tidak tercapainya target Nilai IKPA PA3KN Tahun 2024 adalah karena beberapa faktor di antara adanya Reformulasi Penilaian IKPA per bulan Mei 2024 serta dinamika kebijakan atas pengalokasian anggaran tahun 2024 sangat berpengaruh terhadap penilaian IKPA PA3KN dari unsur Revisi Anggaran dan Deviasi Halaman III DIPA.

PA3KN berkomitmen untuk melakukan pencapaian yang lebih baik untuk Indikator Kinerja Nilai IKPA PA3KN Tahun 2025. Beberapa upaya yang akan dilakukan diantaranya adalah:

- Melakukan perencanaan program/kegiatan yang matang di tahun selanjutnya dengan anggaran yang tersedia.
- Melakukan penginputan RPD setiap triwulannya dengan perencanaan yang telah dilakukan
- Melakukan update pada kegiatan yang telah terlaksana pada

laman RPD.

- Melaporkan capaian output secara tepat waktu
- Berkoordinasi dengan Biro Keuangan serta Biro Perencanaan dan Organisasi dalam hal terjadi dinamika kebijakan pengalokasian anggaran.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Lingkup kerja, proses bisnis, maupun produk dan jasa yang diselenggarakan PA3KN dapat dikategorikan memiliki kekhususan atau karakteristik yang berbeda dengan K/L ataupun unit kerja lainnya. Dengan demikian tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional maupun unit kerja penyelenggara kegiatan yang dapat dikategorikan sama. Namun demikian ada beberapa indikator yang masih dapat dibandingkan seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja PA3KN Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas analisis dalam penyusunan dan penetapan anggaran serta pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI	Persentase Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI	266% (50 dokumen)	N/A	N/A
2		Persentase Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI	174% (50 dokumen)	N/A	N/A
3		Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN	3,751	3,74	100,3
4		Nilai IKPA PA3KN	79,38	N/A	N/A
5		Realisasi Anggaran PA3KN	99,98%	N/A	N/A

Dalam hal membandingkan capaian kinerja kinerja PA3KN dengan unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Sekretaris Jenderal DPR RI, pada Semester I Tahun Anggaran 2024 PA3KN memperoleh penghargaan atas kategori “Nilai

Kinerja Organisasi Unit Kerja Eselon II Tertinggi” dari Sekretaris Jenderal DPR RI. Jika membandingkan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Anggota atas Layanan PA3KN dengan unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Badan Keahlian DPR RI, Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN masih berada diatas rata-rata Indeks Kepuasan Anggota atas Layanan pusat-pusat dibawah koordinasi Badan Keahlian DPR RI. Berikut dilampirkan perbandingan Indeks Kepuasan Pusat-pusat di Badan Keahlian DPR RI.

Tabel 3.12. Perbandingan Indeks Kepuasan Pusat-pusat di Badan Keahlian DPR RI

No	Unit kerja	Indeks
1	Pusat Analisis Keparlemenan	3,751528513
2	Pusat PUU Polhukam	3,736765703
3	Pusat PUU Ekkuinbngkesra	3,739431066
4	PA3KN	3,751017001
5	Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU	3,751017001
	Rata-rata	3,746082323

Sumber: Laporan SKM terhadap Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

PA3KN telah mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan atas Indikator Kinerja Persentase Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI, Persentase Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI dan Realisasi Anggaran PA3KN pada tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan atas kategori “Nilai Kinerja Organisasi Unit Kerja Eselon II Tertinggi” Semester I Tahun Anggaran 2024. Keberhasilan atau peningkatan kinerja tersebut dikarenakan oleh beberapa hal berikut, antara lain:

- a. Komitmen yang kuat dari Kepala PA3KN dan seluruh staf/Analisis APBN untuk memajukan PA3KN yang diantaranya dilakukan melalui peningkatan keahlian, keterampilan dan wawasan para pegawai melalui kegiatan pelatihan/workshop/diskusi pakar.
- b. Adanya kerja sama yang sinergis antara pejabat/staf, Analisis APBN dan para Analisis APBN Non Fungsional dalam mencapai target kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan bersama.
- c. Adanya dukungan Kepala PA3KN kepada para analisis dalam berkreaitivitas sehingga dapat menghasilkan analisis/referensi/laporan/ringkasan/telaahan yang memenuhi target dan lebih berkualitas.

Tabel 3.13. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi atau Upaya yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kualitas analisis dalam penyusunan dan penetapan anggaran serta pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI	1. Persentase Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100% (50 dokumen)	(133 dokumen)	266%	Komitmen untuk dapat memberikan kepuasan Anggota DPR RI atas layanan PA3KN	Tetap menjaga komitmen untuk dapat memberikan kepuasan Anggota DPR RI atas layanan PA3KN
		2. Persentase Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100% (50 dokumen)	(87 dokumen)	174%	Komitmen untuk dapat memberikan kepuasan Anggota DPR RI atas layanan PA3KN	Tetap menjaga komitmen untuk dapat memberikan kepuasan Anggota DPR RI atas layanan PA3KN
		3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN	3,30	3,75	113%	Komitmen untuk dapat memberikan kepuasan Anggota DPR RI atas layanan PA3KN	Tetap menjaga komitmen untuk dapat memberikan kepuasan Anggota DPR RI atas layanan PA3KN
		4. Nilai IKPA PA3KN: - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	96 9,60 19,20 24,00 14,40 28,80	79,38 10 4,78 20,00 10,00 16,67	82,68%	Dinamika kebijakan alokasi anggaran	Antisipasi terhadap dinamika kebijakan alokasi anggaran
		5. Realisasi Anggaran PA3KN	99%	99,98%	100,98%	Perencanaan program kerja yang baik	Tetap menjaga Perencanaan program kerja yang baik

Sumber: Dokumen Capaian Kinerja PA3KN Tahun 2024

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa PA3KN belum dapat mencapai target Nilai IKPA yang diperjanjikan karena adanya reformulasi penilaian IKPA serta dinamika kebijakan atas alokasi anggaran yang menyebabkan rendahnya nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA serta mempengaruhi akumulasi Nilai IKPA PA3KN Tahun 2024. Upaya yang akan dilakukan PA3KN di tahun berikutnya untuk mencapai nilai IKPA sesuai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah dengan melakukan antisipasi terhadap dinamika kebijakan pengalokasian anggaran dengan tidak melakukan revisi RAB dan melakukan perencanaan program kerja yang baik sesuai alokasi anggaran yang tersedia.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja PA3KN tidak lepas dari kebijakan program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala PA3KN. Program/kegiatan yang ditetapkan umumnya sangat mendukung semua tugas dan fungsi PA3KN dan mengarah kepada peningkatan wawasan dan kreativitas Analis APBN. Program/kegiatan PA3KN tahun 2024 dilaksanakan dengan terencana menggunakan *time schedule* yang terukur, sehingga produk output dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Adapun beberapa diantara program/kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.143. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja PA3KN Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Judul Program/Kegiatan
1	Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Kompetensi Analis APBN - Regulasi Berbasis Bukti dengan Pendekatan Kuantitatif
2	Workshop	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Penegakan Hukum Pemberantasan Perdagangan Ilegal Guna Memperbaiki Iklim Industri Tekstil Domestik - Pengembangan Model Shadow Budget (Anggaran Alternatif) Untuk PA3KN - Perampasan Aset Dan Dampaknya Pada Keuangan Negara - Pengembangan Tools Estimasi Biaya Terhadap RUU
3	FGD	<ul style="list-style-type: none"> - Arah Kebijakan dan Tantangan Ekonomi Makro dan Fiskal Tahun 2025 - Sepuluh Tahun Pembangunan Infrastruktur Era Presiden Jokowi: Antara Harapan, Kenyataan dan Catatan - Penguatan Sektor Pariwisata: Pemasaran dan Pariwisata Berkelanjutan

Program kegiatan Pendidikan dan pelatihan, Workshop dan diskusi bersama para pakar yang berguna dalam menambah keterampilan dan wawasan para pegawai serta para analis APBN. Dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan, workshop dan diskusi, maka hasil telaahan/kajian/analisis yang dihasilkan sudah jauh lebih berkualitas dan lebih baik dari sebelumnya sedangkan jumlah telaahan/kajian/analisis telah memenuhi target. Selain program kegiatan yang disebutkan diatas, PA3KN juga melakukan kegiatan Penguatan Bahan Analisis sebagai penunjang untuk menghasilkan output telaahan/kajian/analisis yang lebih berkualitas dengan adanya data dukung yang memadai. Atas setiap produk yang dihasilkan. PA3KN telah mempublikasikan output-outputnya melalui website PA3KN, media sosial, dan dokumen elektronik kepada Pimpinan Anggota DPR RI dan pihak eksternal dalam aplikasi Simfoni dan Whatsapp blast.

Komitmen PA3KN atas keterbukaan informasi dibuktikan melalui penghargaan yang didapatkan. Pada bulan Agustus 2024, Sub Bagian Tata Usaha PA3KN menerima “Penghargaan PPID Pelaksana dengan kualifikasi Informatif” dan menjadi Juara 1 atas “Hasil Pemantauan dan Evaluasi PPID Pelaksana kategori Non-AKD”. Kedua penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi PA3KN agar terus berkomitmen dalam Keterbukaan Informasi Publik.

PA3KN juga memiliki beberapa program inovasi pada tahun 2024 diantara adalah: 1) *Shadow Budget* Penyusunan Macroeconomic Budget (Macbud) Model Dalam Rangka Penyusunan Shadow Budget APBN Untuk Indonesia; 2) Visualisasi Data APBN dan Akuntabilitas Keuangan Negara; 3) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka pengembangan kompetensi Analis. Kegiatan inovatif ini dilakukan guna mempertahankan keunggulan layanan PA3KN yaitu atas data yang terkini, analisis terpercaya, analisis ekonomi terkini, proyeksi anggaran yang tepat, rekomendasi kebijakan fiskal, serta pendekatan terpadu untuk ekonomi, fiskal dan anggaran.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, output yang dihasilkan PA3KN dari Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN adalah sebanyak 133

dokumen sedangkan Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L adalah sebanyak 87 dokumen. Total output yang dimanfaatkan oleh DPR RI pada tahun 2024 adalah sebanyak 220 dokumen. Jumlah Anggaran PA3KN pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 12.838.230.000,- dan direalisasikan sebesar Rp 12.837.943.407,- (99,99%). Jumlah Anggaran PA3KN pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 5.729.642.000,- dan direalisasikan sebesar Rp 5.728.675.452,- (99,98%).

Tabel 3.15. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran PA3KN Tahun 2023 dan 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Output						Anggaran					
		2023			2024			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Meningkatnya kualitas analisis dalam penyusunan dan penetapan anggaran serta pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI	Persentase Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100% (50 dokumen)	(164 dokumen)	328%	100% (50 dokumen)	(133 dokumen)	266%	12.838.230.000	12.837.943.407	99,99%	5.729.642.000	5.728.675.452	99,98%
	Persentase Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100% (50 dokumen)	(137 dokumen)	274%	100% (50 dokumen)	(87 dokumen)	174%						

Sumber: Laporan Kinerja PKA dan PKAKN Tahun 2022, Laporan Kinerja PA3KN Tahun 2023, Dokumen Capaian Kinerja PA3KN Tahun 2024

Efisiensi penggunaan sumber daya dihitung menggunakan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan, yaitu dengan rumus dan hasil penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Sumber Daya} = \frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Sumber Daya Tahun 2024} = \frac{5.728.675.452/220}{5.729.642.000/100} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Sumber Daya Tahun 2024} = \frac{26.039.433}{57.296.420} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Sumber Daya Tahun 2024} = \mathbf{45,44\%}$$

Efisiensi penggunaan sumber daya PA3KN Tahun 2024 dihitung dari jumlah realisasi anggaran PA3KN tahun 2024 per realisasi indikator (output) tahun 2024 dibagi jumlah pagu anggaran PA3KN tahun 2024 per target indikator (output) tahun 2024. Realisasi Anggaran PA3KN Tahun 2024 adalah sebesar Rp 5.728.675.452,- per realisasi Output yang dimanfaatkan oleh DPR RI pada tahun 2024 adalah sebanyak 220 dokumen. Pagu Anggaran PA3KN Tahun 2024 adalah sebesar Rp 5.729.642.000 per target Output yang dimanfaatkan oleh DPR RI pada tahun 2024 adalah sebanyak 100 dokumen. Hasil penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa efisien penggunaan sumber daya yang dilakukan PA3KN tahun 2024 adalah sebesar 45,44%. Hasil penghitungan tersebut menunjukkan bahwa PA3KN dapat menggunakan anggaran untuk menghasilkan output secara efisien.

$$\text{Efisiensi Sumber Daya Tahun 2023} = \frac{12.837.943.407/301}{12.838.230.000/100} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Sumber Daya Tahun 2023} = \frac{42.650.974}{128.382.300} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Sumber Daya Tahun 2023} = \mathbf{33,22\%}$$

Efisiensi penggunaan sumber daya PA3KN Tahun 2023 dihitung dari jumlah realisasi anggaran PA3KN tahun 2023 per realisasi indikator (output) tahun 2023 dibagi jumlah pagu anggaran PA3KN tahun 2023 per target indikator (output) tahun 2023. Realisasi Anggaran PA3KN Tahun 2023 adalah sebesar Rp 12.837.943.407,- dibagi realisasi Output yang dimanfaatkan oleh DPR RI pada tahun 2023 adalah sebanyak 220 dokumen. Pagu Anggaran PA3KN Tahun 2023 adalah sebesar Rp 12.838.230.000,- dibagi target Output yang dimanfaatkan oleh DPR RI pada tahun 2023 adalah sebanyak 100 dokumen. Hasil penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa efisien penggunaan sumber daya yang dilakukan PA3KN tahun 2024 adalah sebesar 33,22%.

Perbandingan efisiensi Sumber Daya PA3KN tahun 2023 dan 2024 berdasarkan penghitungan tersebut menunjukkan bahwa PA3KN telah melakukan efisiensi sumber daya yang sangat baik. Efisiensi penggunaan Sumber Daya tahun 2024 lebih

baik dari 2023. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PA3KN telah melakukan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya, alokasi anggaran yang diterima PA3KN pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp5.729.642.000,-**. Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2024, PA3KN mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp6.765.474.000,-. Dalam rangka mendukung kenaikan tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2024, maka kebijakan Optimalisasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2024 mengubah alokasi anggaran PA3KN TA 2024 menjadi sebesar Rp5.314.442.000,-. Pada triwulan IV tahun 2024, PA3KN merelokasi anggaran sebesar Rp84.800.000,- ke Biro SDMA untuk pembayaran Kontrak Kerja Tenaga Pramubakti serta mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp500.000.000,-. Dengan demikian alokasi anggaran PA3KN TA 2024 sebesar Rp5.729.642.000,-.

Tabel 3.16. Realisasi Anggaran PA3KN Tahun 2024

Program/Output/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
WA. Program Dukungan Manajemen			
WA.6978. Penyusunan Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	5.729.642.000	5.728.675.452	99,98 %
ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan			
ABA .001 Penyusunan Kajian terkait APBN dan Akuntabilitas Keuangan Negara	1.180.675.000	1.179.850.820	99,94%
051 Penyusunan Analisis/Kajian/Referensi/Laporan	858.475.000	858.475.000	100%
052 Pengembangan Analisis/Kajian/Referensi/Laporan	69.200.000	68.500.000	98,99%
053 Penerbitan Karya Tulis Ilmiah	253.000.000	253.000.000	100%
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal			
EBA. 962 Layanan Umum	4.548.967.000	4.548.724.632	99,99%
051 Layanan Koordinasi Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	4.548.967.000	4.548.724.632	99,99%
EBA. 994 Layanan Perkantoran	313.312.000	313.312.000	100%
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	313.312.000	313.312.000	100%

Sumber: SAKTI Kemenkeu

Dari total anggaran Program Dukungan Manajemen Output Penyusunan Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara sebesar Rp5.729.642.000,-, untuk kegiatan Penyusunan Kajian terkait APBN dan Akuntabilitas Keuangan Negara dialokasikan sebesar Rp 1.180.675.000,-. Penyusunan Kajian terkait APBN dan Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri dari Penyusunan Analisis/Kajian/Referensi/Laporan sebesar Rp858.475.000, Pengembangan Analisis/Kajian/Referensi/Laporan sebesar Rp69.200.000 dan Penerbitan Karya Tulis Ilmiah sebesar 253.000.000.

Penyusunan Kegiatan dan Layanan Dukungan Manajemen Internal terdiri dari Layanan Koordinasi Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara sebesar Rp 4.548.967.000,-. Alokasi anggaran Layanan Perkantoran adalah sebesar Rp313.312.000,- untuk kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Untuk alokasi anggaran pada kedua kegiatan tersebut dapat direalisasikan dengan baik diatas 99%. Berdasarkan data dari SAKTI Kemenkeu, Anggaran Program Kegiatan Penyusunan Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara sebesar Rp 5.729.642.000,-. Realisasi Anggaran PA3KN tahun 2024 adalah Rp 5.728.675.452,- dapat direalisasikan sebesar 99,98%. Persentase Realisasi Anggaran tersebut telah mencapai target PK yaitu 99%. Dengan demikian diperoleh capaian atas Indikator Kinerja Realisasi Anggaran adalah sebesar 100,98%. Berikut kami sampaikan perbandingan realisasi anggaran tahun 2022, 2023 dan 2024. Data yang ditampilkan untuk tahun 2022 dan 2023 adalah gabungan data PKA dan PKAKN karena PA3KN baru terbentuk pada bulan Juli 2023.

Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Anggaran PA3KN Tahun 2023 dan 2024

2022			2023			2024		
Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
12.429.230.900	12.424.488.723	99,96	12.838.230.000	12.837.943.407	99,99%	5.729.642.000	5.728.675.452	99,98%

Sumber: SAKTI Kemenkeu

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat penurunan signifikan untuk anggaran tahun 2024. Pada tahun 2022, anggaran yang diperoleh adalah sebesar Rp 12.429.230.900,-, tahun 2023 sebesar Rp 12.838.230.000,- dan tahun 2024 sebesar Rp 5.729.642.000,-. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian analisis efisiensi sumber daya, bahwa meskipun perbandingan output dan anggaran yang tersedia di tahun 2024 menunjukkan efisiensi yang sangat baik, namun sangat berpengaruh pada kualitas Analisis/Referensi/Laporan/Telaahan/Ringkasan yang akan dimanfaatkan oleh DPR RI. Hal tersebut berdampak pada kualitas dukungan keahlian pada DPR RI.

Berkurangnya anggaran yang sangat signifikan untuk penyusunan Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara berpengaruh pada pengalokasian anggaran Narasumber/FGD/Workshop untuk setiap kegiatan penyusunan Analisis. Perlu ditekankan bahwa PA3KN memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung program dukungan keahlian pada fungsi anggaran dan pengawasan Dewan dalam rangka memperkuat kelembagaan Badan Keahlian DPR RI dalam memberi dukungan keahlian. Berkurangnya anggaran PA3KN dalam mendukung Program/Kegiatan Penyusunan Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara dapat berdampak pada kualitas Analisis/Referensi/Laporan/Telaahan/Ringkasan yang akan dimanfaatkan oleh DPR RI. Hal tersebut berdampak pada kualitas dukungan keahlian pada DPR RI.

Penutup



A. Kesimpulan

1. Secara umum kinerja PA3KN mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Jumlah Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN yang dihasilkan sebanyak 133 Dokumen dari 50 yang ditargetkan atau berhasil mencapai 266%. Jumlah Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dihasilkan sebanyak 87 dokumen dari 50 dokumen yang ditargetkan atau berhasil mencapai 174%. Secara keseluruhan jumlah analisis/referensi/laporan yang dimanfaatkan oleh DPR RI mencapai 220 dokumen dari 100 dokumen yang ditargetkan atau berhasil mencapai indikator kinerja tersebut sebesar 220%. Pada semester I Tahun 2024 PA3KN berhasil memperoleh penghargaan atas kategori “Nilai Kinerja Organisasi Unit Kerja Eselon II Tertinggi” dari Sekretaris Jenderal DPR RI. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan PA3KN yang ditargetkan adalah 3,30 dan PA3KN berhasil memperoleh 3.75. Selanjutnya target realisasi anggaran sebesar 99% PA3KN berhasil mencapai realisasi sebesar 99,98%. Pelaksanaan program/kegiatan dilakukan dengan *time schedule* yang terukur sehingga penyediaan bahan analisis/referensi/laporan/referensi/telaahan/ringkasan untuk Dewan dapat terselesaikan tepat waktu. Keberhasilan peningkatan kinerja ini adalah komitmen yang kuat dari seluruh jajaran PA3KN.
2. Tidak tercapainya target Nilai IKPA PA3KN Tahun 2024 adalah karena adanya Reformulasi Penilaian IKPA per bulan Mei 2024 serta dinamika kebijakan atas pengalokasian anggaran tahun 2024 sangat berpengaruh terhadap penilaian IKPA PA3KN dari unsur Deviasi Halaman III DIPA. Hal ini menjadi tantangan kedepan bagi PA3KN untuk mengantisipasi dinamika kebijakan tersebut dan melakukan perencanaan program/kegiatan yang matang di tahun selanjutnya.

B. Upaya yang akan dilakukan kedepan

1. Untuk meningkatkan kinerja PA3KN di tahun mendatang, diperlukan adanya dukungan dari Kepala Badan Keahlian dan Sekjen DPR RI dalam hal Penambahan pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil Analisis APBN;
2. Perlu dipertimbangkan penambahan alokasi anggaran PA3KN

untuk mendukung kualitas output Analisis/Referensi/Laporan/Telaahan/Ringkasan yang akan dimanfaatkan oleh DPR RI serta meningkatkan kepuasan Anggota DPR RI atas layanan PA3KN dan Badan Keahlian terhadap dukungan keahlian pada DPR RI;

3. Untuk meningkatkan Kompetensi Analisis APBN, perlu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan.
4. Melakukan perencanaan kegiatan yang matang di tahun selanjutnya dengan *time schedule* yang terukur pada Rencana Penarikan Dana sehingga dapat mendukung untuk pencapaian nilai IKPA yang maksimal.
5. Merekomendasikan Biro Perencanaan dan Organisasi dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mempertimbangkan target Indikator Nilai IKPA yang lebih *achievable* dalam dokumen Perjanjian Kerja.

PA3KN selalu berkomitmen untuk memberikan informasi secara transparan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja PA3KN. Pada Tahun 2024, PA3KN menerima penghargaan atas Peringkat 1 “Evaluasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024” dengan nilai sebesar 77,20 dengan kategori nilai BB atau Sangat Memuaskan. Hal ini menjadi motivasi bagi PA3KN untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PA3KN. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait, atas pelaksanaan tugas dan fungsi PA3KN Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja Analisis APBN dan pada organisasi PA3KN Badan Keahlian Setjen DPR RI.

Lampiran





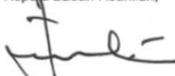
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja PA3KN Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

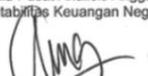
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Analisis dalam Penyusunan dan Penetapan Anggaran serta Pelaksanaan dan Pengawasan Keuangan Negara terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPR RI	1. Persentase Analisis/ Referensi/ Laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
		2. Persentase Ringkasan/ Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%
		3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	3,30
		4. Nilai IKPA Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	96
		- Revisi DIPA	9,60
- Deviasi Halaman III DIPA	19,20		
- Penyerapan Anggaran	24,00		
- Penyelesaian Tagihan	14,40		
- Capaian Output	28,80		
5. Persentase Realisasi Anggaran	99%		

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp6.765.474.000,00

Kepala Badan Keahlian,


Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 19658710 199003 1 007

Jakarta, 6 Desember 2023
Pih. Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara,


Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.
NIP. 19610562 200912 1 002





Lampiran 2. Pernyataan Telah Diriviu Lkj PA3KN Tahun 2024

**SEKRETARIAT JENDERAL**
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
(PA3KN)SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Tingkat Eselon II di Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN).

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal - hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 17 Januari 2025
Inspektur II,

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA.
NIP.196811251993022001



Lampiran 3. Surat Tugas Tim Penyusun LKj PA3KN Tahun 2024



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : 1523/PR.05.04/12/2024

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kinerja di lingkungan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu disusun Laporan Kinerja Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Tahun 2024;
 - bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Penyusun Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara;
 - bahwa penugasan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara
- Dasar :
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
 - Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja



Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menugaskan :

Kepada :

No.	Nama	NIP	Peran
1	Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si.	197210181992031002	Penanggungjawab
2	Slamet Widodo, S.E., M.E.	196702181993021001	Anggota
3	Dian Setiono, S.Sos., CPNLP	197109121997031003	Anggota
4	Sylvia Febrina, S.I.A., M.E., M.A.	199101032018012001	Anggota

- Untuk :
- Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Tahun 2024
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Jakarta, 23 Desember 2024





Prestasi PA3KN

Penghargaan atas kategori “Nilai Kinerja Organisasi Unit Kerja Eselon II Tertinggi” Semester I Tahun Anggaran 2024

BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI			NILAI KINERJA ORGANISASI UNIT KERJA ESELON II SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024		
NO	UNIT	POKDI KINERJA UNIT	NO	UNIT	POKDI KINERJA UNIT
1	Biro Keuangan	91,04	12	Biro ESAP dan Organisasi Internasional	80,23
2	Biro Persidangan I	88,21	13	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	79,75
3	Pusat Analisis Anggaran dan Ekspenditur Keuangan Negara	85,01	14	Biro Persidangan II	73,63
4	Pusat PUU EKPA	85,72	15	Inspektori I	70,57
5	Pusat Analisis Keperlemenan	83,32	16	Inspektori II	70,16
6	Pusat Teknikologi Informasi	82,94	17	Pusat Komunikasi dan Propaganda	70,05
7	Biro Umum	80,10	18	Pusat Penelitian dan Kajian UJ	77,93
8	Biro Perencanaan dan Organisasi	83,40	19	Biro Pengabdian Masyarakat dan Mitra	77,62
9	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	82,94	20	Pusat PUU Pribukam	76,99
10	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat	82,80	21	Biro Pembinaan Paramedis	76,24
11	Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif	81,12			





Prestasi PA3KN

Penghargaan PPID Pelaksana dengan kualifikasi Informatif bagi Sub Bagian
Tata Usaha PA3KN





Prestasi PA3KN

Gold Winner / Juara 1 atas “Hasil Pemantauan dan Evaluasi PPID Pelaksana kategori Non-AKD”





Prestasi PA3KN

Peringkat 1 (satu) unit kerja terbaik atas Hasil Evaluasi Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2024 dan meraih dengan Nilai 77,20 dan kategori BB (Sangat Memuaskan)





PA3KN
PA3KN
PA3KN
PA3KN
PA3KN
PA3KN
PA3KN

20
24



PA3KN
PA3KN
PA3KN
PA3KN
PA3KN
PA3KN
PA3KN
PA3KN
PA3KN



 (021) 5715 269

 (021) 5715 635

 pa3kn.dpr.go.id

 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 6, Jl.
Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270

